

Menggali Akar Permasalahan: Kajian Mendalam Terhadap Data Kemiskinan Dan Mekanisme Bantuan Sosial

Aulia Rahma¹, Dwi Ayu Lestari², Rosita Ali Nasiroh³, Ahmad Afif⁴

¹ Ekonomi Syari'ah, ¹ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

² Ekonomi Syari'ah, ¹ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

^{1*}rahmaulia419@email.com, ²Dwid5091@email.com, ³alirrosita49@email.com, ⁴ahmadafif200587@gmail.com

Abstrak

Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember telah menurun. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember turun dari 236,46 ribu (9,51%) pada Maret 2023 menjadi 224,77 ribu (9,01%) pada Maret 2024, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penurunan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan melalui program bantuan sosial yang berbeda. Studi ini menyelidiki bagaimana program bantuan sosial di Kabupaten Jember, terutama Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), berhasil mengurangi tingkat kemiskinan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Di beberapa desa di Kabupaten Jember, subjek penelitian adalah pendamping PKH, aparat desa, dan keluarga penerima manfaat. Menurut hasil penelitian, PKH di Desa Sumber Kejayan, Kecamatan Mayang, telah efektif dalam input, proses, dan output. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa 99% anak usia sekolah dari keluarga penerima manfaat terdaftar di satuan pendidikan dan 88% melaporkan tingkat kehadiran yang baik. Di Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari, juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat berkat penggunaan BLT DD. Namun, ada beberapa kesulitan dalam menentukan sasaran penerima. Hasilnya adalah bahwa program bantuan sosial seperti PKH dan BLT DD memainkan peran penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember. Namun, untuk menjadikannya lebih efisien, mekanisme pendataan dan bantuan harus diperbaiki agar tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Tingkat Kemiskinan, Kabupaten Jember, Bantuan Sosial, Keluarga Penerima Manfaat

PENDAHULUAN

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas dan keandalan data. Dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data, peneliti dapat meningkatkan keakuratan dan keandalan temuan mereka. Termasuk mendapatkan izin dari responden, menjaga kerahasiaan informasi pribadi, dan memastikan bahwa partisipasi responden adalah sukarela, penelitian ini menjalankan etika.

Kompleksitas faktor penyebab kemiskinan dan konsekuensi sosial ekonominya membuat masalah kemiskinan di Jember menjadi masalah penting. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), ada perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember sebesar 9,51%, atau 236.460 orang. Namun, pada Maret 2024, angka ini turun menjadi 0,01%, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 224.777.000 orang. Terlepas dari penurunan, angka-angka ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah yang signifikan di Jember. Mekanisme distribusi bantuan sosial adalah masalah utama yang terkait erat dengan kemiskinan. Bantuan sosial dianggap sebagai alat penting oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin. Namun, keberhasilan program bantuan sosial sangat bergantung pada data penerima yang akurat, sasaran yang tepat, dan sistem penyaluran yang berfungsi dengan baik. Untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi mereka yang menerimanya, sangat penting untuk melakukan evaluasi kritis terhadap mekanisme ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki secara menyeluruh sumber kemiskinan di Jember. Penelitian ini akan berkonsentrasi pada analisis data terbaru tentang kemiskinan dan menilai mekanisme bantuan sosial yang tersedia saat ini. Pentingnya penelitian ini didasarkan pada beberapa faktor berikut:

- 1) **Akurat dan Relevansi Data:** Mendapatkan data kemiskinan yang akurat dan relevan sangat penting untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran. Untuk memberikan gambaran lengkap tentang profil kemiskinan di Jember, penelitian ini akan menggunakan data terbaru dari BPS dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Karakteristik demografis, tingkat pendapatan, akses ke layanan dasar, dan komponen lain yang berkontribusi terhadap kemiskinan akan dibahas dalam penelitian ini.
- 2) **Evaluasi Efektivitas Kebijakan:** Studi ini akan mengevaluasi secara kritis berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang telah diterapkan di Jember, seperti program bantuan sosial, pelatihan keterampilan,

pemberdayaan ekonomi, dan program lainnya. Analisis dampak program terhadap penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin akan menjadi bagian dari evaluasi ini.

- 3) Identifikasi Permasalahan Distribusi: Penelitian ini akan mencari masalah dan hambatan dalam mekanisme distribusi bantuan sosial, seperti kesalahan target, duplikasi penerima, penyalahgunaan dana, dan inefisiensi birokrasi. Analisis ini akan melibatkan wawancara dengan penerima manfaat dan melihat dokumen dan regulasi terkait.
- 4) Rekomendasi Kebijakan yang Tepat Sasaran: Penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan tepat sasaran kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Jember. Rekomendasi ini akan dibuat berdasarkan hasil analisis data dan evaluasi kebijakan. Pengembangan program inovatif yang memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, peningkatan koordinasi antar instansi, peningkatan pengawasan, dan perbaikan sistem pendataan adalah beberapa rekomendasi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jember dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang akar masalah, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan saat ini, dan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan di masa depan. Selain itu, penelitian ini akan menjadi referensi bagi penelitian lain di bidang yang sama dan memberikan inspirasi untuk pengembangan kebijakan.

METODE

Tahapan Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan campuran, yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mempelajari data statistik tentang kemiskinan di Jember, seberapa efektif program bantuan sosial, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Data kuantitatif diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial Kabupaten Jember, dan sumber lain yang relevan. Hipotesis penelitian diuji dengan analisis statistik deskriptif dan inferensial, yang juga digunakan untuk menemukan hubungan antara variabel yang diteliti.

Untuk memahami konteks sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi kemiskinan dan efektivitas bantuan sosial di Jember, pendekatan kualitatif digunakan. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara menyeluruh dengan sejumlah orang, termasuk penerima bantuan sosial, petugas Dinas Sosial, dan tokoh masyarakat. Observasi lapangan juga dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana program bantuan sosial dijalankan dan bagaimana petugas dan penerima manfaat berinteraksi satu sama lain. Studi dokumentasi juga dilakukan untuk melihat kebijakan, peraturan, dan laporan yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan di Jember. Teknik analisis konten dan analisis tematik digunakan untuk menemukan pola, tema, dan makna yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil analisis kuantitatif dan kualitatif kemudian diintegrasikan untuk memberikan interpretasi yang mendalam dan menyeluruh.

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang akurat dan terorganisir tentang karakteristik, kenyataan, dan hubungan antara variabel yang diteliti. Penelitian dilakukan di Kabupaten Jember, dengan penekanan pada daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan/atau program bantuan sosial yang signifikan. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu tertentu karena data dan sumber daya yang diperlukan tersedia. Metode penentuan informan menggunakan *sampling purposive* dan *snowball*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam beberapa tahun terakhir, penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Jember telah menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan sosial melalui berbagai program bantuan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) termasuk dalam kategori ini. terbukti memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.

Meski demikian, dalam pelaksanaannya, program-program ini masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan perhatian lebih. Salah satu permasalahan yang paling mencolok adalah ketepatan sasaran penerima manfaat. Penelitian menunjukkan bahwa masih ada kasus di mana bantuan sosial diterima oleh individu yang sebenarnya tidak tergolong miskin, sedangkan kelompok yang lebih membutuhkan sering kali dicoret dari daftar penerima karena sistem pendataan yang kurang optimal. Ini menandakan bahwa mekanisme verifikasi dan validasi data penerima manfaat perlu diperbaiki agar bantuan ini benar-benar mencapai masyarakat miskin yang memerlukan.

Di samping itu, proses distribusi bantuan juga terhambat oleh tantangan birokrasi yang cukup kompleks. Walaupun dana bantuan sosial telah disiapkan, pelaksanaan di lapangan kerap kali mengalami keterlambatan akibat prosedur administrasi yang rumit. Sebagai contoh, di beberapa desa, pencairan BLT DD mengalami kendala karena perbedaan data antara pemerintah daerah dan pusat, yang mengakibatkan keterlambatan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang sangat bergantung pada dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Selain isu-isu teknis ini, dampak jangka panjang dari program bantuan sosial masih menjadi bahan perdebatan. Meskipun bantuan sosial dapat mengurangi tekanan ekonomi bagi masyarakat miskin dalam jangka pendek, keberlanjutan manfaatnya memerlukan evaluasi lebih lanjut. Salah satu kritik penting terhadap bantuan sosial adalah potensinya dalam menciptakan ketergantungan di kalangan penerima manfaat, yang bisa menghambat usaha mereka untuk mencapai kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengintegrasikan program bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi yang fokus pada peningkatan keterampilan dan akses ke lapangan kerja bagi masyarakat miskin.

Dari penelitian ini, muncul pula temuan bahwa bantuan sosial memberikan dampak positif terhadap akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga penerima manfaat. Data menunjukkan bahwa 99% anak dari keluarga penerima PKH terdaftar di sekolah, mengindikasikan bahwa program ini menjadi faktor pendukung penting dalam mendorong partisipasi pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun, meskipun angka partisipasi sekolah meningkat, tantangan lain yang perlu diatasi adalah kualitas pendidikan dan tingkat kelulusan, karena faktor ekonomi bukan satu-satunya penentu keberhasilan pendidikan anak-anak dari kelompok miskin.

Di bidang kesehatan, bantuan sosial juga berkontribusi dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan dasar. Dengan adanya bantuan ini, penerima manfaat lebih mudah mengakses fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit tanpa terbebani biaya tinggi. Namun, salah satu kendala utama yang masih ada adalah terbatasnya akses layanan kesehatan di daerah pedesaan, yang membuat masyarakat miskin sering kali harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan perawatan medis. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih progresif untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, agar dampak bantuan sosial dalam sektor kesehatan dapat lebih optimal.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkapkan bahwa program bantuan sosial, seperti PKH dan BLT DD, memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Jember. Namun, untuk meningkatkan efektivitas program tersebut, perlu dilakukan perbaikan di berbagai aspek. Hal ini mencakup peningkatan akurasi dalam pendataan penerima manfaat, percepatan dalam distribusi bantuan, serta integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan bantuan sosial tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga dapat menjadi sarana yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

a. Data kemiskinan

Secara etimologis, kata "miskin" berasal dari kata "miskin", yang artinya tidak memiliki harta benda dan serba kekurangan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan memiliki banyak dimensi, sehingga menjadi prioritas pembangunan. Menurut penelitiannya, kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan seseorang dan merupakan masalah yang tersebar di seluruh dunia (Yacoub, 2012).

Menurut (World Bank, 2004) salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (lack of income and assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (acceptable). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (the poor) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

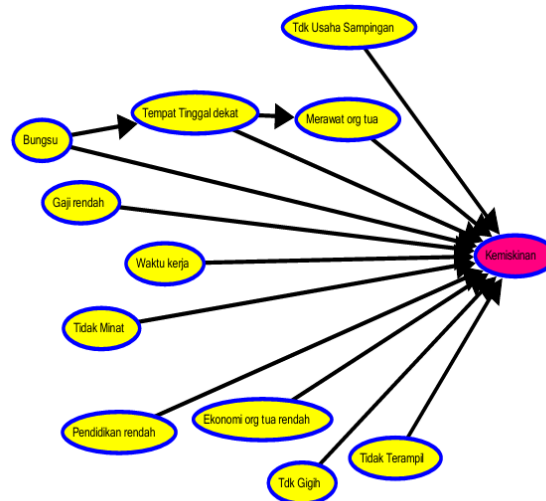
Menurut Adisasmita (2005), beberapa indikator kemiskinan yang paling umum digunakan adalah tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, penyerapan anak usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kalori dan protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, dan urbanisasi. Tingkat kemiskinan tidak hanya terdiri dari tingkat pendapatan yang rendah dan kekurangan makanan; itu juga mencakup tingkat kesehatan, pendidikan, dan perlakuan adil di muka hukum, antara lain (Adisasmita, 2015).

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember secara umum mengalami tren penurunan dari tahun 2011 hingga 2024. Persentase penduduk miskin sebesar 12,44 persen pada tahun 2011 turun hampir setiap tahun hingga mencapai 9,01 persen pada tahun 2024, penurunan sebesar 3,43 persen poin.



Gambar 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Jember, 2011-2024

Menurut Kartasasmita (1996), ada dua jenis kemiskinan berdasarkan pola waktu: Kemiskinan adalah masalah yang pasti akan terjadi di semua negara, terutama di negara-negara berkembang dan tertinggal. Kemiskinan memiliki banyak aspek dan disebabkan oleh banyak faktor yang tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, budaya, politik, sosial, dan sistem sosial lainnya (Suharto, 2005). (a) kemiskinan yang berlangsung lama atau turun temurun; wilayah seperti ini biasanya berada di daerah yang sangat membutuhkan sumber daya alamnya, atau daerahnya yang terisolasi (kemiskinan yang berkelanjutan), (b) kemiskinan yang mengikuti siklus ekonomi secara keseluruhan, (c) kemiskinan musiman, seperti yang dialami nelayan dan petani tanaman pangan, atau (d) kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam atau akibat kebijakan tertentu yang mengurangi kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor penyebab kemiskinan tersebut secara umum dapat diidentifikasi sebagian besar berasal dari faktor internal individu tersebut.



Hubungan yang kompleks antara individu yang hidup dengan daya lemah dalam tradisi keluarga, masyarakat dalam struktur sosial (negara) yang kompleks, dan menganut sistem produksi modern adalah penyebab kemiskinan, menurut Chamsyah (2008). Ketidakejahteraan ini disebabkan utama oleh individu. Kemiskinan struktural disebabkan oleh struktur sosial yang menghancurkan institusi sosial terkecil, keluarga. Penyebab-penyebab ini tidak peduli dengan upaya mengatasi kemiskinan. Kemiskinan dapat merujuk pada kondisi yang dialami oleh individu atau kelompok, serta kondisi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, sebuah negara atau bangsa dapat dianggap miskin secara keseluruhan. Negara-negara ini sekarang disebut sebagai negara berkembang atau negara miskin untuk menghindari stigmatisasi. Menurut hasil penelitian, kabupaten Jember memiliki faktor kemiskinan utama, yaitu: (1) Analisis data menunjukkan bahwa dua elemen utama memengaruhi kondisi desa miskin: kualitas sumber daya manusia dan aksesibilitas dan ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan sumber daya pendidikan, ketersediaan berbagai lembaga pendidikan, dan tingkat keterampilan yang berbeda, terutama dalam kaitannya dengan pasar input (faktor produksi) dan output (barang dan jasa). Secara umum, masalah utama adalah kualitas sumber daya manusia. Ditunjukkan oleh proporsi keluarga pertanian yang besar dan jumlah buruh tani yang besar.

b. **Bantuan sosial**

Pemerintah Kabupaten Jember, yang memiliki tanggung jawab terhadap adanya isu kemiskinan di wilayah Kabupaten Jember, telah merumuskan berbagai kebijakan untuk mempercepat penanganan kemiskinan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial, pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa "Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah sebuah usaha terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah." Untuk mencapai tujuan tersebut, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember, yang diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember. Berdasarkan Nomor 8 Tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dasar-dasar untuk penanggulangan kemiskinan adalah Rencana Induk Kesejahteraan Sosial (RIKSD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Di bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lansia, Fakir Miskin, dan Korban Bencana, dinas sosial melakukan berbagai inisiatif untuk mengatasi kemiskinan. Ini terutama terlibat dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin, yang mengatur kebijakan dan program untuk fakir miskin. Bapak Agus Pujiharto, S.Sos., kepala bidang penyandang masalah kesejahteraan sosial lansia, fakir miskin, dan korban bencana, adalah orang yang diwawancarai oleh peneliti. Dia memberikan komentar sebagai berikut:

“Ada dua program dalam pelayanan sosial fakir miskin ini yang akan diberikan kepada stakeholder, atau dalam kasus ini masyarakat miskin, yaitu program yang membantu keluarga miskin menjalankan bisnis dan yang kedua program yang membeli sarana dan prasarana untuk mendukung bisnis keluarga miskin”.

Selain Dinas Sosial Kabupaten Jember, ada beberapa faktor yang berperan dalam memberikan layanan kepada fakir miskin. Selain itu, ada elemen tambahan yang perlu dipertimbangkan. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, Dinas, Instansi Provinsi, atau Instansi Kabupaten untuk melaksanakan dan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasannya di Kecamatan. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ditugaskan untuk membantu Dinas Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Bantuan Sosial merupakan program pemerintah yang diatur secara langsung dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial tercantum pada pasal 1 ayat 1 bahwa Bantuan Sosial merupakan “bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial”.

Pemerintah telah menetapkan tiga pendekatan strategis dalam pembangunan untuk mencapai sasaran menurunkan angkatan kerja yang tidak bekerja serta kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendekatan pertama adalah Pro-Pertumbuhan, yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan investasi dan memperbaiki kualitas pengeluaran pemerintah serta konsumsi. Pendekatan kedua adalah Pro-Lapangan Kerja, yang ditujukan untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja, sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang. Pemerintah juga merancang tiga kelompok utama dalam menangani masalah kemiskinan dengan menerapkan strategi pro-poor. Kelompok I fokus pada bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, Kelompok II berfokus pada penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, dan Kelompok III terfokus pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil, yang juga dikenal sebagai UMKM.

c. Peran dan Tantangan Program Bantuan Sosial

Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) memiliki peran yang sangat signifikan dalam meringankan beban ekonomi masyarakat miskin di Jember. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta memberikan perlindungan sosial bagi kelompok-kelompok yang rentan.

Namun, meski memiliki dampak positif, efektivitas program-program ini masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi:

1. Ketepatan Sasaran: Salah satu tantangan utama adalah memastikan bantuan sosial diberikan kepada pihak yang tepat. Oleh karena itu, sistem pendataan dan verifikasi yang akurat sangat diperlukan untuk mencegah kesalahan dalam penyaluran bantuan.
2. Efisiensi Distribusi: Proses distribusi yang lambat dan rumit dapat mengurangi dampak positif dari program. Perlu adanya perbaikan dalam mekanisme distribusi dan pengurangan birokrasi agar penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
3. Keberlanjutan Dampak: Bantuan sosial jangka pendek dapat membantu mengurangi kemiskinan, namun pertanyaan mengenai keberlanjutan dampaknya tetap harus dijawab. Diperlukan program-program yang menggabungkan bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi untuk menciptakan kemandirian jangka panjang bagi masyarakat.
4. Kualitas Layanan: Peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan harus sejalan dengan peningkatan kualitas layanan tersebut. Investasi dalam infrastruktur serta pengembangan sumber daya manusia sangat penting agar dampak yang dihasilkan dapat optimal.

d. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Jember:

1. Peningkatan Akurasi Data: Meningkatkan sistem pendataan dan verifikasi penerima manfaat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
2. Perbaikan Mekanisme Distribusi: Menyederhanakan prosedur distribusi bantuan dan meningkatkan koordinasi antara instansi terkait agar penyaluran dapat dilakukan dengan lebih cepat.
3. Integrasi dengan Program Pemberdayaan Ekonomi: Mengembangkan program yang mengintegrasikan bantuan sosial dengan pelatihan keterampilan, akses modal usaha, serta pendampingan untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat.
4. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar: Meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia di sektor pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah pedesaan.
5. Penguatan Pengawasan dan Transparansi: Mengintensifkan pengawasan atas penyaluran bantuan sosial dan memastikan adanya transparansi dalam pengelolaan program untuk meningkatkan akuntabilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, program bantuan sosial seperti PKH dan BLT DD di Kabupaten Jember telah menunjukkan kontribusi yang positif dalam mengurangi angka kemiskinan. Program ini berperan penting dalam membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan akses pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan mendukung layanan kesehatan bagi kelompok rentan.

Meski demikian, efektivitas program ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan ketepatan sasaran penerima manfaat, yang memerlukan perbaikan dalam sistem pendataan dan verifikasi. Selain itu, proses distribusi bantuan juga mengalami kendala birokrasi yang mengakibatkan keterlambatan dalam pencairan dana di beberapa daerah. Ini menegaskan pentingnya perbaikan dalam sistem penyaluran agar bantuan dapat disalurkan dengan lebih cepat dan tepat sasaran.

Salah satu aspek krusial yang perlu diperhatikan adalah dampak jangka panjang dari program bantuan sosial ini. Jika bantuan yang diberikan tidak diiringi dengan strategi pemberdayaan ekonomi, ada risiko masyarakat akan menjadi tergantung pada bantuan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang program yang lebih terintegrasi, di mana bantuan sosial dijadikan sebagai pendukung program pemberdayaan ekonomi untuk membantu masyarakat miskin agar lebih mandiri secara finansial.

Dalam hal pendidikan, program bantuan sosial telah berkontribusi pada peningkatan angka partisipasi sekolah anak-anak dari keluarga miskin. Namun, penting untuk melakukan evaluasi lebih mendalam mengenai kualitas pendidikan dan

tingkat keberlanjutan bagi anak-anak tersebut, sehingga tidak hanya mendorong angka pendaftaran, tetapi juga memastikan mereka menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Di sektor kesehatan, program ini telah meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan dasar. Namun, masih terdapat keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah pedesaan yang perlu ditangani agar seluruh penerima manfaat dapat mengakses layanan kesehatan secara merata.

Berdasarkan berbagai temuan dalam penelitian ini, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial di Kabupaten Jember:

1. Meningkatkan akurasi data penerima manfaat melalui sistem verifikasi yang lebih ketat dan berbasis teknologi, guna mencegah kesalahan dalam distribusi bantuan.
 2. Memperbaiki mekanisme distribusi agar lebih cepat, transparan, dan bebas dari kendala birokrasi yang menghambat pencairan dana bagi masyarakat miskin.
 3. Mengintegrasikan program bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan akses modal usaha, agar penerima manfaat dapat beralih dari ketergantungan kepada bantuan menjadi lebih mandiri.
 4. Memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah terpencil, untuk memastikan semua penerima manfaat mendapatkan layanan dasar yang setara.
 5. Meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam distribusi bantuan sosial, agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses penyaluran dana kepada yang benar-benar membutuhkan.
- a) Menggali akar permasalahan adalah kunci penting dalam penyelesaian masalah yang efektif. Teknik seperti Root Cause Analysis (RCA), 5 Whys, dan DMAIC dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab utama masalah dan mencegahnya terulang kembali. Metode analisis akar masalah seperti MAAMS juga dapat digunakan.
- b) Kemiskinan adalah masalah kompleks dan multidimensional yang menjadi prioritas pembangunan. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pendapatan dan aset, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan. Indikator kemiskinan meliputi tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak, dan akses terhadap layanan dasar. Di Kabupaten Jember, tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan antara tahun 2011 dan 2024.
- c) Program bantuan sosial bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat rentan dan mengurangi kemiskinan. Pemerintah menetapkan strategi pembangunan Pro-Growth, Pro-Job, dan Pro-Poor untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi Pro-Poor berfokus pada bantuan sosial terpadu, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan UMKM.

Dengan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan program bantuan sosial di Kabupaten Jember tidak hanya mampu menekan angka kemiskinan dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri secara ekonomi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang mendukung penelitian dan pengabdian yaitu Dosen Pamong dan Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan sepanjang proses penelitian ini. Keberhasilan penelitian ini tidak terlepas dari dedikasi dan ilmu yang telah diberikan. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Instansi Lembaga Dinas Sosial Kabupaten Jember atas kerjasama dan informasi yang sangat berharga, yang memungkinkan kami untuk memahami lebih dalam mengenai program bantuan sosial di daerah ini. Dukungan kalian semua sangat berarti bagi kami dan menjadi motivasi untuk terus berkarya dan berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Artikel dari website Republika.co.id. Judul "Strategi Bantuan Sosial dan Rekomendasi Kebijakan BPS Kabupaten Jember. "Profil Kemiskinan Kabupaten Jember Maret 2024," no. 20 (2024): 1–8.
- Dealey, C. (1999). *The Care of Wounds: A Guide for Nurses*. Oxford: Blackwell Sciences.
- Ferezegia, Debrina Vita. "Jurnal Sosial Humaniora Terapan Analisis Tingkat Kemiskinan." *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 4, no. 1 (2018): 1–6. <http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/download/6/1>.
<https://beritajatim.com/persentase-kemiskinan-warga-jember-di-bawah-rata-rata-jatim>
https://digilib.uinkhas.ac.id/35301/1/Elok%20Safitri_204105020095.pdf
<https://e-journal.uajy.ac.id/1756/3/2EP15294.pdf>
<https://e-journal.uajy.ac.id/30065/3/191125079%202.pdf>
<https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/1362>
<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2Fold19%2F131195-T+27312-Determinan+kemiskinan-Tinjauan+literatur.pdf>
https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/31916/3/T1_222017017_Bab%202.pdf
<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/69063/HENGGARSYAH%20ARIA%20HUTAMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
https://www.researchgate.net/publication/340628147_EFEKTIVITAS_PROGRAM_KELUARGA_HARAPAN_PKH_DI_DESA_SUMBER_KEJAYAN_KECAMATAN_MAYANG_KABUPATEN_JEMBER
- Kuncoro, M. (2013). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.
- Lutvi, Muhamad, and Rohim. "Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Untuk Mengurangi Kemiskinan Di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember" 6, no. 2 (2024): 226–35.
- Marzuki, M.S. (2009). *Permainan Simulasi di Indonesia*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

- Pokhrel, Sakinah. "No TitleEΛENH." *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.
- "Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia" dalam *Journal of Macroeconomics and Social Development* 1, no. 4 (2024): 1–13. Sumber informasi: <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.317>
- Sinurat, Ronaldo Putra Pratama. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Registratie* 5, no. 2 (2023): 87–103. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554>.
- Siti khalimatus Sangadah. "BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Kemiskinan 2.1.1 Definisi Kemiskinan," 2017.
- Wiyono, M. (2009). Profesionalisme Dosen dalam Program Penjaminan Mutu. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 16(1), 51-58.
- Yamin, H.M. (2007). *Profesionalisasi Guru & Implementasi KTSP*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Adawiyah, El. "Kemiskinan Dan Fakor-Faktor Penyebabnya" 1, no. April (2020): 43–50.
- Jember, D I Kabupaten. "Emil Wahyudiono, S.ST NIM : 050820201007," 2010.
- Habibi, Ityan, and Akbar Maulana. "Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin Di Dinas Sosial Kabupaten Jember," 2020, 1–14.